

**IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK
MAMPU DI NAGARI SIKILANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

WIDIA

2110012111041

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Nama : **Widia**

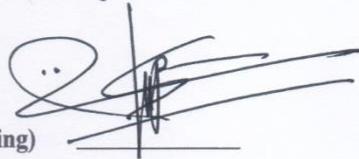
Nomor : **2110012111041**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi : **Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi
Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
Di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Pembimbing)



**IMPLEMENTASI FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK
MAMPU (SKTM) DI NAGARI SIKILANG KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Widia¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: widiapsm35@gmail.com

ABSTRACT

The Wali Nagari has a role in issuing Certificates of Poverty. This is regulated in West Pasaman Regency Regulation Number 2 of 2018 concerning Nagari. Problem Formulation: 1) How is the Wali Nagari's role implemented in the population administration process for the issuance of Certificates of Poverty in Nagari Sikilang, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency? 2) What are the obstacles faced by the Village Head of Sikilang in issuing Certificates of Poverty in Sikilang Village, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency? 3) What efforts have been made by the Village Head of Sikilang in issuing Certificates of Poverty in Sikilang Village, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency? Type of Research: Sociological Jurisprudence, data sources used: primary and secondary data, data collection techniques: document study and interviews, analyzed using qualitative analysis. Research Results: 1) Implementation of the Village Head's function in the Population Administration process for the issuance of a Certificate of Indigence in Sikilang Village, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency. 2) The obstacles faced by the Nagari Sikilang Village Head in issuing Certificates of Poverty in Nagari Sikilang, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency. 3) The efforts made by the Nagari Sikilang Village Head in issuing Certificates of Poverty in Nagari Sikilang, Sungai Aur Subdistrict, West Pasaman Regency.

Keyword: Implementation of Functions, Village Chief, Certificate of Inability.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Nagarinya serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di tingkat nagari mengikuti alur prosedural yang sistematis, dimulai dari pendaftaran permohonan yang diajukan masyarakat, dilanjutkan dengan proses validasi informasi yang dilakukan oleh aparatur nagari, dan diakhiri dengan pengesahan dokumen oleh wali nagari.

¹Pelaksanaan prosedur ini menuntut penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang ketat supaya program bantuan dapat disalurkan dengan tepat kepada penerima yang berhak serta dapat diverifikasi secara publik. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis melakukan Penelitian yang berjudul “**FUNGSI WALI NAGARI DALAM PROSES ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI NAGARI SIKILANG, KECAMATAN SUNGAI AUR, KABUPATEN PASAMAN BARAT**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi fungsi Wali Nagari dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi kendala-kendala Dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?

¹ Ayu Ratnasari, 2021, ‘Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Aparat Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai. Kartanegara’, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 4 Agustus 2021, hlm. 214.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi fungsi Wali Nagari Sikilang dalam proses Administrasi Kependudukan terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi kendala-kendala Dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi hukum *Socio-legal Research* atau Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik sosial dan bagaimana kondisi sosial dapat mempengaruhi penerapan hukum tersebut²

III. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Pelaksanaan fungsi Wali Nagari dalam proses administrasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

² Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm. 81.

di Nagari Sikilang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menyentuh kepentingan masyarakat. Wali Nagari sebagai pimpinan tertinggi di tingkat nagari memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pelayanan administrasi, khususnya yang menyangkut kepentingan sosial seperti SKTM, dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya ketegasan Wali Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2. Tekanan Sosial Dari Masyarakat
3. Ketiadaan Slip Gaji sebagai Hambatan dalam Verifikasi Status Ekonomi Masyarakat
4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan tujuan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Kelemahan Sistem Pendataan Warga dalam Administrasi Nagari
6. Tidak Adanya Regulasi atau Peraturan Nagari (Pernag)

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi kendala-kendala Dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.

1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan ketat untuk proses penerbitan SKTM.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kriteria penerbitan SKTM untuk mengurangi tekanan sosial terhadap perangkat Nagari dalam penerbitan surat tersebut.
3. Memanfaatkan data alternatif seperti tagihan listrik, rekening koran, atau informasi lain yang dapat mencerminkan

an kondisi ekonomi warga, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Nagari dengan pendekatan yang ramah dan edukatif untuk membantu masyarakat memahami proses dan pentingnya SKTM.
5. Memberikan pelatihan kepada perangkat Nagari dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi.
6. Mendorong Wacana Pembentukan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Penerbitan SKTM

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Fungsi pelayanan telah dijalankan dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat dan prosedur pengurusan yang sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan terhadap kelayakan penerima SKTM masih sangat lemah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang antara lain:
 - a. Kurangnya ketegasan Wali Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - b. Tekanan Sosial dari Masyarakat
 - c. Ketiadaan Slip Gaji sebagai hambatan dalam Verifikasi Status Ekonomi Masyarakat.
 - d. Rendahnya Tingkat kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan tujuan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - e. Kelemahan sistem pendataan Masyarakat dalam Administrasi Nagari.
 - f. Tidak Adanya Regulasi atau Peraturan Nagari (Pernag)

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang untuk mengatasi Kendala-kendala Dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu diantaranya:
 - a. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan ketat untuk proses penerbitan SKTM.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kriteria penerbitan SKTM untuk mengurangi tekanan sosial terhadap perangkat Nagari dalam penerbitan surat tersebut.
 - c. Memanfaatkan data alternatif seperti tagihan listrik, rekening koran, atau informasi lain yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi warga, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Nagari dengan pendekatan yang ramah dan edukatif untuk membantu masyarakat memahami proses dan pentingnya SKTM.
 - e. Memberikan pelatihan kepada perangkat Nagari dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi.
 - f. Mendorong Wacana Pembentukan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.

B. Saran

1. Agar Wali Nagari dan Perangkat Nagari Sikilang melakukan Pengawasan terhadap kelayakan penerima SKTM, harus diperkuat dengan peningkatan ketegasan Wali Nagari dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan sebelum penerbitan surat..
2. Agar Wali Nagari dan Perangkat Nagari Sikilang untuk segera menyusun Peraturan Nagari (Pernag) yang mengatur secara rinci tentang prosedur, kriteria, dan mekanisme verifikasi dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Agar Wali Nagari Sikilang membentuk sistem pendataan masyarakat miskin

dan penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara digital di tingkat Nagari. Penggunaan teknologi informasi akan memudahkan dalam pelacakan data dan mencegah duplikasi penerbitan surat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

C. Sumber Lain

Ayu Ratnasari, 2021, 'Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Aparat Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, Nomor 4 Agustus 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Penasehat Akademik Penulis, Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Candra SY, S.H., M.H**
5. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

